

PROBLEMATIKA DWIFUNGSI ABRI

Fatimah Aqilah Ichtiari

Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Ilma Nur Safira ^{*1}

Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia
ilmanursafira04@upi.edu

Ismail Fauzan Ramadhan

Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Muhammad Adam Fahri A.

Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Naswa Putri Nur Firdaus

Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Dadi Mulyadi Nugraha

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

This research is intended to critically analyze the issue of the dual function of ABRI that occurred in Indonesia. The method that we use in this research is descriptive method with Bibliographic Writing Technique (Literature Review). Based on this technique, we found that the role of ABRI that dominant in the government cause a negative effect to civilians. The solution to this problem was remove the dual function of ABRI under Abdurrahman Wahid presidency, as one of the reform efforts in Indonesia.

Keywords: Dual function, ABRI, Security and Defense.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan sebagai analisis kritis problematika perihal dwifungsi ABRI yang pernah terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan Teknik Penulisan Bibliografi (Teknik Telaah Pustaka atau Tinjauan Pustaka). Berdasarkan Teknik tersebut diperoleh bahwa peranan ABRI yang mendominasi dunia pemerintahan menimbulkan dampak kurang baik terhadap warga sipil. Penyelesaian masalah ini adalah dengan dihapuskannya kebijakan dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, sebagai salah satu upaya reformasi di Indonesia.

Kata Kunci: Dwifungsi, ABRI, Pertahanan Keamanan

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Namun hal tersebut bukan akhir dari perjuangan yang telah dilakukan. Hal itu justru menjadi awal dari perjuangan baru yaitu mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Pemerintah saat itu mulai membahas perihal upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mana baru terbentuk. 19 Agustus 1945, diputuskan oleh pemerintahan Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan.

Dwifungsi merupakan buah pemikiran yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru dimana disebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terutama Tentara Nasional Indonesia memiliki dua tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban serta memegang kekuasaan dan mengatur jalannya negara.

Dimunculkannya sebuah konsep Dwifungsi ABRI adalah sebagai wadah untuk menampung tekad dan semangat pengabdian ABRI itu sendiri. Serentak dengan kekuatan-kekuatan lain memikul tanggung jawab dan tugas untuk mempertahankan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam sektor pertahanan keamanan negara dan sektor kesejahteraan bangsa dalam rangka mewujudkan misi nasional yang telah tercantum pada Pancasila dan UUD 1945.

Konsep dwifungsi ABRI berasal dari jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI yang bertujuan untuk memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia bersama kekuatan lainnya. Untuk mencapai tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik dalam hal keamanan dan kesejahteraan negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses diterapkannya konsep dwifungsi ABRI, dampak dwifungsi ABRI pada sistem pemerintahan Indonesia, dan alasan penghapusan dwifungsi ABRI pada tahun 1998. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul, "**Problematika Dwifungsi ABRI**".

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan metode untuk menghimpun dan mengolah data sehingga menghasilkan data guna menghasilkan informasi yang dapat memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Metodologi penelitian berperan sangat signifikan dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Makna yang terkandung dalam metodologi berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengujian data yang diperlukan untuk pemecahan suatu masalah penelitian.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan Teknik Penulisan Bibliografi (Teknik Telaah Pustaka). Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan sebagaimana adanya suatu peristiwa dan kejadian yang menjadi sorotan. Telaah Pustaka merupakan aktivitas peninjauan kembali dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti-peneliti lain berkaitan dengan topik bahasan yang akan diteliti, mengkritisi penelitian dari peneliti sebelumnya, membangun relevansi antara topik bahasan, dan mengidentifikasi isu sentral yang beredar dalam suatu bidang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa ketika Indonesia melawan Belanda menjadikan persepsi golongan militer memaknai dirinya tidak hanya sebagai penjaga Hankam saja, melainkan sebagai kekuatan politik juga. Para pemuda yang turun tangan melawan Belanda tidak didasari keinginan berkarir dalam militer, tetapi semangat patriotik yang ditunjukkan oleh politisi. Sifat perjuangan inilah yang menjadi awal kuatnya kecenderungan golongan militer kedalam hal-hal berbau politik.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya ABRI di dunia politik negara Indonesia, yakni faktor eksternal (kondisi sosial politik Indonesia diawal kemerdekaan) dan faktor internal (peranan ABRI).

Kondisi Sosial Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

Seperti negara lainnya saat awal kemerdekaan, Indonesia tidak langsung memiliki politik yang sehat. Begitu pula kondisi sosial masyarakatnya yang mudah diadu domba sehingga banyak terjadi perdebatan, maka dapat diartikan bahwa kondisi sosial Bangsa Indonesia diawal kemerdekaan belum berlangsung dengan baik.

Partai politik dan organisasi sosial saat itu merupakan kekuatan-kekuatan yang terpecah-belah. Ketidakstabilan sosial politik yang dialami Indonesia ini melengserkan semangat kemerdekaan penuh pengabdian menjadi ambisi mencari kekuasaan.

Keadaan politik yang sedemikian kacau menyebabkan Soekarno menempatkan ABRI (militer) kedalam dunia sosial politik guna menetralkan dan menjaga kestabilan situasi saat itu.

Peranan ABRI

ABRI mengadakan pengamanan fisik, dimana ABRI akan menindak serta mencegah terhalangnya realisasi ketertiban dan juga keamanan. Dalam kalimat lain, selain menjalankan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan, ABRI juga harus melakukan pengamanan terhadap politis-psikologis kebijakan pemerintah. Sehingga, saat masa orde baru dwifungsi ABRI mempunyai dua tugas, diantaranya menjaga ketertiban dan juga keamanan negara serta menjadi kekuatan sosial-politik.

Pada awalnya, konsep dwifungsi ABRI dikenalkan pada pidatonya Jenderal A.H Nasution saat acara HUT Akademi Militer Nasional pada tahun 1958. Kebijakan Dwifungsi ABRI mulai diperkuat pada masa pemerintahan Soeharto. Kebijakan ABRI adalah sebagai sistem Hankam negara. Tidak hanya itu, ABRI juga berperan pada bidang-bidang non-militer, misalnya bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan juga dipegang oleh ABRI, seperti wali kota, bupati, pemerintah provinsi, bahkan menteri pada kabinet Soeharto. Hal ini menimbulkan dampak yang kurang baik pada masyarakat sipil. Dampak dari banyaknya dari anggota ABRI yang berada di bidang atau sektor pemerintahan adalah jatah warga untuk masuk ke bidang atau sektor pemerintahan menjadi berkurang dan minatnya juga berkurang karena hal tersebut.

Saat masa pemerintahan Soeharto, banyak penyalahgunaan kebijakan dwifungsi ABRI. Pada masa ini, ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya karena karakteristik militer yang tunduk terhadap atasan. Presiden Soeharto bertindak secara otoriter, dan menggunakan ABRI sebagai tameng untuk mengamankan

mereka yang menurutnya menjadi pengganggu dari kepemimpinannya. Kekuasaan saat masa Presiden Soeharto ini membuat sistem pemerintahan Indonesia tidak transparan kepada publik.

Pada tahun 1998, terjadi reformasi di Indonesia yang menginginkan ABRI hanya fokus pada tugas utamanya, yakni sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dwifungsi ABRI mulai dihapuskan sebagai salah satu upaya reformasi di Indonesia.

Penghapusan dwifungsi ABRI dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penghapusan Fraksi TNI/Polri dari DPR pada tahun 2004. Puncak berakhirnya pelaksanaan dwifungsi ABRI adalah setelah penghapusan Fraksi TNI/Polri dari DPR pada 2004. Sejak tahun 1998, setelah terjadinya reformasi, dwifungsi ABRI dihapuskan dan TNI hanya memiliki satu tugas yaitu untuk menjaga Hankam negara. Dengan dihapusnya dwifungsi ABRI, TNI dapat lebih fokus pada tugas utamanya yakni sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil perihal problematika dwifungsi ABRI yaitu:

1. Faktor penyebab munculnya pihak militer dalam dunia politik nasional, yaitu:
 - a. Faktor eksternal, kondisi sosial politik awal kemerdekaan Indonesia belum berlangsung dengan baik. Partai politik dan organisasi sosial terpecah belah sehingga semangat kemerdekaan berubah menjadi ambisi mencari kekuasaan.
 - b. Faktor internal, Tahun 1958 kebijakan ABRI mulai diperkuat pada masa pemerintahan Soeharto, dimana kebijakan ABRI berfungsi sebagai penjaga Hankam dan berperan dalam bidang sosial politik dan ekonomi.
2. Kebijakan ABRI menimbulkan dampak kurang baik terhadap warga sipil, berkurangnya kursi pemerintahan untuk warga sipil karena ABRI yang juga berada pada bidang atau sektor pemerintahan tanpa dilakukan pemilihan.
3. Dwifungsi ABRI dihilangkan atau dihapuskan pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid sebagai salah satu upaya reformasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V., & Ningsih, W. L. (2022, April 25). *PERAN ABRI PADA MASA ORDE BARU*. Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/25/140000879/peran-abri-pada-masa-orde-baru?page=all>
- Amanda, S. N. (2022, Maret 21). *DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE BARU*. Retrieved from [kumparan.com: https://kumparan.com/salma37220/dwifungsi-abri-pada-masa-orde-baru-1xirX4Hp72Y](https://kumparan.com/salma37220/dwifungsi-abri-pada-masa-orde-baru-1xirX4Hp72Y)
- Anwar, A. (2020). DWIFUNGSI ABRI : MELACAK SEJARAH KETERLIBATAN ABRI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Adabiya*.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). DWIFUNGSI TNI DARI MASA KE MASA. *Jurnal Academia Praja*.
- Eko, A. R., Kurniawati, K., & Maulani, M. (2020). DWIFUNGSI ABRI DALAM KONFLIK INTERNAL PDI 1976-1998. *Jurnal Pendidikan Sejarah*.

- Fatih, M. A. (2022, Januari 20). *KONSEP DWIFUNGSI ABRI ERA ORDE BARU*. Retrieved from zenius.net: <https://www.zenius.net/blog/dwifungsi-abri-orde-baru>
- Hasudungan, A. N. (2021). DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII. *arikhuna: Journal of History and History Education*.
- Huda, N. (2001). KONTROVERSI DASAR HUKUM SIDANG ISTIMEWA MPR DAN MAKLUMAT PRESIDEN 23 JULI 2001 (TINJAUAN YURIDIS KETATANEGARAAN). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Ibrahim, M. S. (2018). PENGHAPUSAN HAK TNI DALAM KETERLIBATAN POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM. *Universitas Islam Negeri "SMH" Banten*.
- Komalig, K. R. (2017). HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014. *Lex Crimen*.
- Kriswantoni, S. (2018). PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SEJARAH NASIONAL INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*.
- Lantik, A. (2014). *DWIFUNGSI ABRI : LEGALISASI KEKUASAAN GOLONGAN MILITER DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU*. Retrieved from repository.usd: https://repository.usd.ac.id/25464/2/081314053_full%5B1%5D.pdf
- Mas'oed, M. (2019). DEMOKRASI SEBAGAI PROYEK HEGEMONI : WACANA POLITIK INDONESIA PASCA ORDE BARU 1998-2015. *Disertasi UGM*.
- Prasetyo, F. A. (2020). REFORMASI DIKORUPSI : INDONESIA UNDER JOKOWI. *Revolutionary Socialism in 21st Century*.
- Puanmaharani, S. (2021, Agustus 13). *DWIFUNGSI ABRI*. Retrieved from tribun news wiki: <https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/13/dwifungsi-abri>
- Putra, P. P., Herman, & Mardison, S. (2021). KONTRIBUSI JENDERAL BESAR A.H. NASUTION TERHADAP DWIFUNGSI ABRI (1958-1998). *Jurnal Cerdas Mahasiswa*.
- Ramadhan. (2021, Maret 4). *MELIHAT KEMBALI DWIFUNGSI ABRI DI ERA ORDE BARU*. Retrieved from asumsi.co: <https://www.asumsi.co/post/57655/melihat-kembali-dwifungsi-abri-di-era-orde-baru/>
- Rikan, K. (2014). KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DI MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-1998. *Repository UPY*.
- Rona, & dkk. (2022). DWIFUNGSI ABRI DALAM SOSIAL POLITIK SEBAGAI GERAKAN AKAR RUMPUT PADA MASA ORDE BARU. *KRAKATOA: Journal of History, History Education and Cultural Studies*.
- Sadewo, J. (2023, Juni 1). *REVISI UU TNI DINILAI MEMBUKA TABIR GELAP DWIFUNGSI ABRI*. Retrieved from news.republika: <https://news.republika.co.id/berita/rvjgsj318/revisi-uu-tni-dinilai-membuka-tabir-gelap-dwifungsi-abri>
- Salamony, J. W. (2022). WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Jurnal Lex Specialis*.
- Subagyo, A. (2017). MEWUJUDKAN PROFESIONALISME TNI AD DI ERA REFORMASI. *Jurnal Karya Virajati Seskoad Bandung*.
- Suprawito, S. (2011). KOMUNIKASI INTRA DAN ANTAR BUDAYA DALAM MEMBENTUK KEPERIBADIAN TNI. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Suryawan, I. P., & Sumarjiana, I. K. (2020). IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan*.
- Tambunan, A. S. (2019). BEBERAPA HAL POKOK TENTANG DWI FUNGSI ABRI. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

- Unknown. (2019, Maret 14). *DWIFUNGSI TNI : KEMUNDURAN REFORMASI*. Retrieved from kema.unpad: <https://kema.unpad.ac.id/dwi-fungsi-tni-kemunduran-reformasi/>
- Utami, S. N., & Gischa, S. (2021, Maret 19). *DWIFUNGSI ABRI : SEJARAH DAN PENGHAPUSAN*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/19/133958069/dwifungsi-abri-sejarah-dan-penghapusan>
- Vonika, D. (2020). HISTORICAL REVIEW OF MILITARY INVOLVEMENT IN INDONESIAN POLITICS. *International Journal on Social Science*.
- Wibowo, T. (2018). SOSIOLOGI MILITER: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN. *Interdisciplinary Approaches to Human Communication: Second Edition*.
- Zainuddin, A. (2020). *MODUL PEMBELAJARAN SMA SEJARAH INDONESIA KELAS XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.